

EVALUASI REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SORONG

EVALUATION OF BUDGET REALIZATION TO ASSESS PERFORMANCE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY AT THE POPULATION CONTROL, FAMILY PLANNING, WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION SERVICE OF SORONG REGENCY

Dessy Pattipeiluhu¹, Fanny Jitmau², Markus Muda³

^{1,2,3}Politeknik Saint Paul Sorong

¹Pattipeiluhudesi9@gmail.com, ²fannyjitmau28@gmail.com, ³markusmuda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi anggaran sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data anggaran dan realisasi anggaran dari periode tahun 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi anggaran yang dicapai oleh pemerintah. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran dari pada Dinas Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sorong tahun 2022 kurang efektif dan efisien, pada tahun 2023-2024 menunjukkan kenaikan hingga mencapai cukup efektif dan efisien. Hasil rata-rata memiliki tingkat efektivitas sebesar 60,42% yang berarti cukup efektif dan efisien, yaitu belum maksimal pencapaian targetnya anggaran. Karena belum menyelesaikan target program dalam ketepatan waktu ketepatan menentukan pilihan ketepatan berpikir dan ketepatan perhitungan biaya.

Kata Kunci: Kinerja, Anggaran, Efektivitas, Efisiensi

Abstract

This study aims to include budget realization as a tool to assess the effectiveness and efficiency of performance at the Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Service in Sorong Regency. The method used is a qualitative approach using budget data and budget realization from the period 2022-2024. The results of the study indicate that there is a gap between the allocated budget and the budget realization achieved by the government. The conclusion of the results of this study is that the level of effectiveness and efficiency of budget realization of the Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Service in Sorong Regency in 2022 is less effective and efficient, in 2023-2024 it shows an increase to reach quite effective and efficient. The average result has an effectiveness level of 60.42% which means it is quite effective and efficient, namely the maximum budget target has not been achieved. Because it has not completed the program target in a timely manner, precisely determining choices, thinking accuracy and calculating costs.

Keywords: Performance, Budget, Effectiveness, Efficiency

1. PENDAHULUAN

Anggaran adalah dokumen yang merinci kegiatan suatu organisasi dalam bentuk kualitatif untuk periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam nilai moneter, meskipun dapat juga mencakup barang. Anggaran publik berkaitan dengan proses distribusi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dalam bentuk uang. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh publik. Selain itu, anggaran juga menunjukkan alokasi dana publik yang telah disetujui oleh lembaga legislatif untuk digunakan. Dengan informasi pengeluaran yang terdapat dalam anggaran pemerintahan, analisis dapat dilakukan untuk menilai apakah anggaran berfungsi sebagai pengendali dalam pelaksanaan kegiatan publik, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018).

Laporan realisasi anggaran adalah jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebelum diwajibkan untuk menyusun laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran di sektor publik berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendanaan dari potensi lokal serta kemampuan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2011).

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sorong merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan anak dan perempuan melalui berbagai program. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran yang terjadi.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Sering kali ditemukan alokasi dana yang tidak tepat sasaran, pemborosan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan evaluasi anggaran semakin memperburuk situasi ini. Akibatnya, dana yang seharusnya dapat memberikan dampak optimal bagi pemberdayaan anak dan perempuan justru tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang belum terstruktur dengan baik menjadi kendala besar dalam menilai sejauh mana anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata. Tanpa adanya evaluasi yang komprehensif, sulit untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pelaksanaan program, serta mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Sorong.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang berbunyi "Evaluasi Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan anggaran dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja di Dinas Perlindungan Perempuan dan anak di Kabupaten Sorong telah berlangsung secara efektif dan efisien.dengan baik.

2. TEORI/METODE PENELITIAN/PERANCANGAN

Dasar Teori

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh para ahli sebagai berikut: M. Nafarin (2007:11) meyakini, "Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang." Menurut Garrison, Norren and Brewer (2007:4), "Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya

lainnya selama suatu periode waktu tertentu.” Sedangkan menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.” Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas penulis menyimpulkan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. Sasongko dan Parulian (2015), berpendapat bahwa Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kualitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012). Sedangkan pengertian anggaran menurut “*Committee on Governmental Accounting*” yang dikutip oleh Haruman, (2010) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Indra Bastian (2010) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

Dari beberapa pengertian anggaran diatas maka penulis menarik kesimpulan Anggaran Sektor Publik merupakan perencanaan finansial yang penting untuk memproyeksikan pengeluaran dan penerimaan di masa depan, dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Dalam konteks sektor publik, penganggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen, tetapi juga sebagai proses politik yang melibatkan transparansi dan partisipasi publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik, diskusi, dan masukan terhadap anggaran yang direncanakan. Pentingnya sektor publik dalam kemajuan suatu bangsa menegaskan bahwa kegagalan dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak luas, mengganggu sektor bisnis dan sosial, serta memicu krisis. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan. Anggaran berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik.

Secara keseluruhan, anggaran adalah rencana tertulis yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu, yang memungkinkan manajemen untuk merencanakan, mengatur, dan

mengevaluasi kegiatan organisasi dengan lebih efektif. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)
Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
 - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
 - a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,
 - b. Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variances*)
 - c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians,
 - d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)
Anggaran merupakan wujud komitmen dan *budget holder (eksekutif)* kepada pemberi wewenang (*legislatif*). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.
7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding*

but achievable maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Merupakan masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan dan Organisasi masyarakat lainnya harus terlibat dalam proses penggaran publik. Keterlibatan mereka bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan ,pembangunan maupun rencana kinerja publik(daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Menurut Mahsun (2011), Definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. Menurut Halim,(2012) APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain lain.

Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu:

1. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara perekonomian. dan mengupayakan keseimbangan fundamental

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Osman Rusmana (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dan realisasinya selanjutnya akan dicatat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Anggaran Berikut adalah beberapa tujuan khusus realisasi anggaran:

1. Mencapai Keseimbangan Anggaran: Tujuan utama realisasi anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dilakukan. Dengan memastikan keseimbangan ini, pemerintah atau entitas sektor publik dapat menghindari defisit anggaran yang berlebihan.
2. Memastikan Penggunaan Dana Sesuai Rencana: Realisasi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan digunakan sesuai dengan alokasi dan prioritas yang telah ditetapkan dalam anggaran. Ini mencakup memastikan bahwa belanja yang direncanakan benar-benar digunakan untuk tujuan yang diinginkan.
3. Menilai Pencapaian Tujuan Pembangunan: Anggaran sering kali mencantumkan tujuan-tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah atau entitas sektor publik. Realisasi anggaran membantu menilai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai dan apakah alokasi dana mendukung pencapaian tersebut.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan: Realisasi anggaran memberikan dasar informasi untuk pengambilan keputusan. Data realisasi anggaran dapat digunakan untuk membuat keputusan perbaikan, penyesuaian anggaran, atau perubahan strategi keuangan yang diperlukan.

Kinerja adalah ukuran konkret atau parameter yang digunakan untuk menilai atau mengukur tingkat pencapaian suatu tujuan atau hasil dari suatu kegiatan atau program. Indikator kinerja memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana suatu kegiatan atau program telah berhasil atau tidak berhasil mencapai tujuannya Mahsun (2006) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi, masukan, keluaran dan hasil (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Beberapa alat dan metode yang umum digunakan untuk mengukur kinerja antara lain: .

1. *Key Performance Indicators* adalah indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi, tim, atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran tertentu. *Balanced Scorecard* adalah kerangka kerja manajemen strategis yang menggunakan beberapa indikator kinerja, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan, untuk mengukur kinerja organisasi.
2. *Benchmarking* melibatkan perbandingan kinerja organisasi atau proses dengan organisasi atau proses terbaik dalam industri atau sektor yang sama.
3. Survei dan *Feedback* dari karyawan, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya dapat digunakan untuk mengukur kepuasan, persepsi, atau harapan mereka terhadap kinerja organisasi atau individu.
4. Penilaian kinerja karyawan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja individu terhadap tujuan, standar, dan ekspektasi yang telah ditetapkan.
5. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi dengan membandingkan berbagai rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Mahmudi (2007) mengatakan efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai.

Indikator Kriteria efektivitas kinerja pemerintah menurut (makmur, 2011) sebagai berikut:

- a) Ketepatan waktu
- b) Ketepatan perhitungan biaya
- c) Ketepatan dalam pengukuran
- d) Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e) Ketepatan berpikir

Efektivitas anggaran adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan berhasil mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Efektivitas hanya menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, tanpa mempertimbangkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas anggaran menggambarkan kemampuan organisasi dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang telah direncanakan.

1. Penggunaan Sumber Daya yang Optimal : Efektivitas anggaran memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.
2. Akuntabilitas Publik : Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan. Efektivitas anggaran menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
3. Peningkatan Kinerja : Dengan mengevaluasi efektivitas anggaran, instansi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran antara lain:

1. Rasio Realisasi Anggaran
Mengukur seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan.

2. Pencapaian Sasaran
Mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran dapat tercapai.
3. Dampak Program
Menilai dampak dari program yang didanai oleh anggaran terhadap masyarakat atau sektor yang menjadi sasaran.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas anggaran sebagai berikut

1. Perencanaan yang Baik
Perencanaan yang matang dan realistis sangat penting untuk mencapai efektivitas anggaran.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kemampuan dan kompetensi SDM dalam pengelolaan anggaran berpengaruh besar terhadap efektivitas.
3. Sistem Monitoring dan Evaluasi
Adanya sistem yang baik untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran dapat meningkatkan efektivitas.
4. Koordinasi Antar Instansi
Kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dapat mendukung pencapaian tujuan bersama.

Efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan serta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan.

Mardiasmo(2009) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Efisiensi kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang penting. Menurut (Bastian, 2006) berikut beberapa indikator penentu efisiensi kinerja pemerintah daerah

1. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
2. Faktor struktur organisasi, susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
3. Faktor sumber daya manusia, seperti tenaga, kerja, kemampuan kerja, peralatan kerja, tempat bekerja dan dana keuangan.
4. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan yaitu kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut dalam suatu usaha yang berdaya dan berhasil untuk mencapai sasaran.

Efisiensi anggaran adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instansi atau organisasi dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang minimal. Dalam konteks pengelolaan anggaran, efisiensi mencerminkan kemampuan untuk memaksimalkan output atau hasil dari setiap unit input yang digunakan, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Efisiensi anggaran tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan hasil dari program yang dilaksanakan.

1. Pengelolaan Sumber Daya yang Optimal:
Efisiensi anggaran memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil yang maksimal. Dalam konteks pemerintahan, di mana sumber daya sering kali terbatas, efisiensi menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan.
2. Pengurangan Pemborosan

Dengan fokus pada efisiensi, instansi dapat mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak.

3. Peningkatan Kinerja

Efisiensi anggaran berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi. Dengan menggunakan sumber daya secara efisien, instansi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan lebih baik, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Keberlanjutan Program

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga berkontribusi pada keberlanjutan program. Dengan mengelola anggaran secara efisien, instansi dapat memastikan bahwa program-program yang bermanfaat dapat terus dilaksanakan dalam jangka panjang.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran antara lain:

1. Rasio Biaya terhadap Hasil

Mengukur biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tertentu. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien penggunaan anggaran.

2. Produktivitas

Mengukur output yang dihasilkan per unit input. Ini dapat mencakup jumlah layanan yang diberikan, jumlah proyek yang diselesaikan, atau hasil lainnya yang relevan. Misalnya, produktivitas dapat diukur dengan jumlah layanan kesehatan yang diberikan per anggaran yang dikeluarkan.

3. Perbandingan dengan Standar

Membandingkan kinerja anggaran dengan standar atau benchmark yang telah ditetapkan. Ini dapat membantu dalam menilai seberapa efisien suatu instansi dalam menggunakan anggaran.

4. Analisis Varian

Membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran untuk mengidentifikasi penyimpangan. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi anggaran antara lain:

1. Perencanaan yang Matang

Perencanaan yang baik dan realistis sangat penting untuk mencapai efisiensi anggaran. Perencanaan yang buruk dapat mengakibatkan alokasi dana yang tidak tepat dan pemborosan. Proses perencanaan harus melibatkan analisis kebutuhan yang mendalam dan penetapan prioritas yang jelas.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan kompetensi SDM dalam pengelolaan anggaran berpengaruh besar terhadap efisiensi. SDM yang terlatih dan berpengalaman dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, mengidentifikasi peluang untuk efisiensi, dan mengimplementasikan praktik terbaik.

3. Sistem Pengawasan dan Kontrol

Adanya sistem yang baik untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang ketat dapat mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Sistem kontrol internal yang efektif juga dapat membantu dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana.

4. Inovasi dan Teknologi

Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat membantu dalam otomatisasi proses, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan akurasi dalam pengelolaan data. Misalnya, penggunaan perangkat lunak manajemen anggaran dapat membantu dalam perencanaan dan pelaporan yang lebih efisien.

5. Keterlibatan Stakeholder

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran dapat meningkatkan efisiensi. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait, instansi dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan, serta mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi.

METODE PENGUMPULAN DATA

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana proses anggaran dilaksanakan dan dampaknya terhadap efektivitas serta efisiensi kerjanya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menggali pengalaman, pandangan, dan pendapat dari pihak terkait untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan anggaran. Pendekatan kualitatif memungkinkan data dikumpulkan secara deskriptif dan berfokus pada makna yang terkandung dalam proses dan hasil realisasi anggaran. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2025. Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu 2 bulan, yang mencakup pengajuan izin, pengumpulan dokumen anggaran, wawancara, serta analisis data.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong, yang terletak di Jl Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Penelitian ini memanfaatkan informasi sekunder yang diambil dari dokumen resmi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KB3A) di Kabupaten Sorong. Informasi yang digunakan mencakup dokumen anggaran, laporan penerapan anggaran, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan untuk periode 2022 hingga 2024. Data sekunder ini diperoleh secara langsung dari lembaga terkait melalui permintaan resmi dan telah dicek keabsahannya. Data yang dihimpun dalam penelitian ini termasuk laporan penerapan anggaran P2KB3A Kabupaten Sorong untuk tahun 2022, 2023, dan 2024.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan Sugiyono (2013), analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatur data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis.

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100$$

Sumber: peraturan menteri keuangan RI No 62 tahun(2023)

Berdasarkan formula diatas untuk melihat kriteria efektivitas dan tidak efektivitas nilai kinerja anggaran berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3. 1

Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas

Persentase pengukuran	Kriteria efektif
90% >	Sangat efektif
80% - 90% >	Efektif
60% - 80% >	Cukup efektif
50% - 60%	Kurang efektif
< 50%	Tidak efektif

Sumber: peraturan menteri keuangan RI No. 62 tahun (2023)

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100$$

Adapun pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan adalah :

a) Wawancara

Peneliti mengadakan pertemuan langsung untuk bertanya kepada orang-orang yang berhubungan di lingkungan Dinas P2KB3A Kabupaten Sorong, seperti pejabat struktural, staf keuangan, dan pelaksana program. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan kendala dalam realisasi anggaran, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dinas

b) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di kantor Dinas P2KB3A Kabupaten Sorong untuk melihat secara nyata proses administrasi, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran di lapangan. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks pelaksanaan anggaran dan kinerja secara lebih mendalam

c) Studi kepustakaan

Pada penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk merumuskan definisi anggaran, efektivitas, dan efisiensi, serta untuk mengidentifikasi indikator-indikator pengukuran yang digunakan dalam evaluasi realisasi anggaran pada Dinas P2KB3A Kabupaten Sorong.

Berdasarkan formula diatas untuk melihat kriteria efektivitas dan tidak efektivitas nilai kinerja berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi

Persentase pengukuran	Kriteria efisiensi
90% >	Sangat efeasien
80% - 90% >	Efisien
60% - 80% >	Cukup efisien
50% - 60%	Kurang efisien
<50%	Tidak efisien

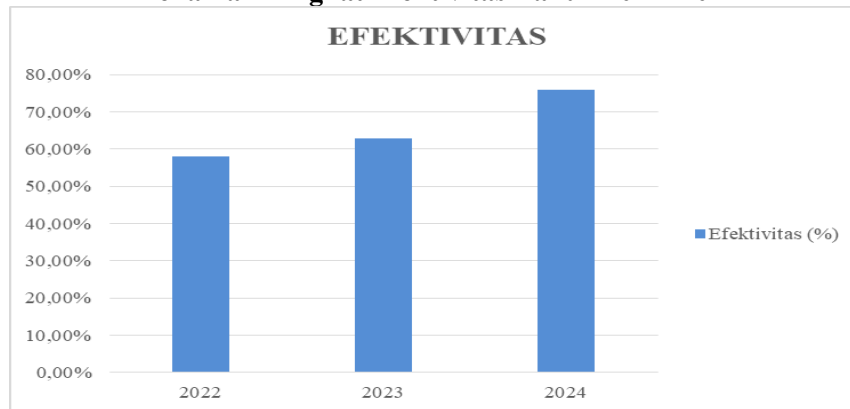
Sumber: peraturan menteri keuangan RI No.62 tahun (2023)

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa” ” Evaluasi Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sorong” melalui data diatas dilihat dari hasil rata rata tahun anggaran 2022-2024 sebesar 60,42% menurut analisis kriteria rasio dikatakan cukup efektif dan efisien.

Dari hasil analisis efektivitas kinerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sorong dari tahun 2022 -2024 hasil rata –rata memiliki tingkat efektivitas sebesar 60,42% yang berarti cukup efektif, yaitu belum mencapai target anggaran. Tahun 2022 rasio efektifitas masih di bawah 60% dan tahun 2023-2024 rasio efektivitas mengalami kenaikan diatas 60%.

Kenaikan Tingkat Efektivitas Tahun 2022 -2024



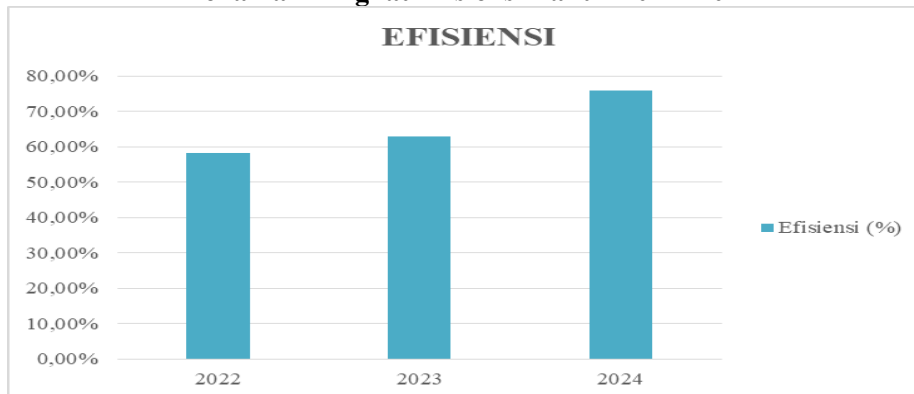
Gambar 3.1 Grafik Efektifitas
 Sumber : Diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan gambar grafik efektifitas 4.2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada rasio efektifitas .

1. Rasio efektifitas untuk tahun anggaran 2022 memulainya pada tingkat 58,14% yang menyebabkan rasio efektifitasnya berada pada kurang efektif dikarenakan ketepatan waktu dalam mencari perencanaan atau program masih sangat kurang .
2. Rasio efektifitas tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,73% menyebabkan rasio efektifitas menjadi cukup efektif dikarenakan faktor kurangnya perhitungan biaya dan menentukan pilihan dalam proyek atau program yang dilakukan
3. Rasio efektifitas tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,04% menyebabkan rasio efektifitas menjadi cukup efektif dikarenakan kurangnya ketepatan waktu dan menentukan pilihan dalam program atau proyek untuk masyarakat belum bisa dikatakan tepat sasaran

Dari hasil analisis efisiensi kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Sorong memperoleh hasil rata-rata yaitu 60,42% yang memiliki tingkat rasio efisiensi. Pada tahun 2022 tingkat rasio efisiensi dalam kategori kurang efisien dan pada tahun 2023 -2024 tingkat rasio efisien mengalami kenaikan sehingga menjadi kategori cukup efisien.

Kenaikan Tingkat Efisiensi Tahun 2022 -2024



Gambar 3.2 Grafik Efisiensi

Berdasarkan pada Gambar 3.2 menunjukkan kenaikan pada rasio efisien.

1. Rasio efisiensi untuk tahun anggaran untuk tahun anggaran 2022 memulainya pada tingkat 58,14% yang menyebabkan rasio efisien berada pada tingkat kurang efisien dikarenakan sumber daya belum maksimal
2. Rasio efisiensi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,73% yang menyebabkan rasio cukup efisien dikarenakan kurangnya faktor pengawasan pimpinan
3. Rasio efisien tahun 2024 mengalami kenaikan 13,04% yang menyebabkan rasio cukup efisien

4. KESIMPULAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya. Efektivitas dalam pengelolaan anggaran berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan serta target kebijakan, menekankan hasil nyata dari setiap alokasi dana. Sementara itu, efisiensi dalam analisis pertumbuhan belanja berperan penting untuk menilai perkembangan anggaran dan kinerja instansi, menjadi indikator utama dalam pencapaian pelaksanaan program guna mewujudkan sasaran strategis, visi, dan misi organisasi secara optimal
2. Tingkat efektivitas realisasi anggaran Dinas Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 tergolong tidak efektif, menunjukkan kegagalan dalam mencapai target secara optimal. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, efektivitas meningkat hingga kategori cukup efektif. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas tahun 2022-2024 mencapai 60,42%, yang mengindikasikan bahwa pencapaian target anggaran masih belum maksimal. Keterlambatan dalam menyelesaikan program, kurangnya ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta kelemahan dalam perencanaan strategis menjadi faktor utama yang perlu segera diperbaiki agar efektivitas anggaran dapat ditingkatkan secara signifikan.
3. Tingkat efisiensi realisasi anggaran Dinas Pengendalian dan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 tergolong tidak efisien, menunjukkan pengelolaan anggaran yang kurang optimal. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, tingkat efisiensinya mengalami perbaikan dan mencapai kategori cukup baik. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi anggaran selama periode 2022-2024 mencapai 60,42%, yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, pencapaian efisiensi masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- [2] Government Accounting Standards Board. 2018. GASB Concept Statement No. 4: Elements of Financial Statements. Norwalk: GASB
- [3] Halim (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Haruman, A. (2010). Pengantar Akuntansi Sektor Publik.
- [5] Kothari, C.R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques (2nd Edition). New Delhi: New Age International Publishers. 45
- [6] Mardiasmo, M. B. A. Akuntansi sektor publik edisi terbaru. Penerbit Andi, 2021.
- [7] Mahsun, Moh, Firma Sulistyowati, and Heribertus Andre Purwanugraha. "Akuntansi sektor publik." Yogyakarta: BPFE (2011).
- [8] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset..
- [9] Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

- [10] Mahmudi (2016). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [11] Mahsun (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [12] Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- [13] Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- [14] Pemerintah Kabupaten Sorong.,2021. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong 2020. Sorong: Pemkab Sorong.
- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- [16] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- [17] sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [18] Sasongko, C., & Parulian, S. (2015). Anggaran. Jakarta: Salemba Empat
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara